



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BOGOR**



KATA PENGANTAR


Puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 –2024. Secara yuridis formal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Bogor, 4 Maret 2022

Kepala

Rudy Mashudi, S.T., M.P
Pembina
NIP. 197707062006041018

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor.....	1
1. Kedudukan	2
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi.....	2
B. Isu Strategis.....	5
C. Dasar Hukum.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	7
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1. PERENCANAAN KINERJA	7
B. TUJUAN DAN SASARAN	7
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	10
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	16
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	19
Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah.....	19
Sasaran 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	28
Sasaran 3: Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	29
Sasaran 4: Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel.....	30
BAB IV	36
PENUTUP	36
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	37

Daftar Tabel

Tabel 1 Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024	10
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024	10
Tabel 3 Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2021	14
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021	15
Tabel 5 Predikat Nilai Capaian Kinerja	16
Tabel 6 Target Capaian dan Realisasi Tujuan Bappeda Tahun 2019-2024	17
Tabel 7 Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 8 Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2020	18
Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	19
Tabel 10 Daftar inovasi yang diimplementasikan tahun 2021	27
Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	28
Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3	29
Tabel 13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4	30
Tabel 14 Rincian Penilaian LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2021	31
Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Kegiatan	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kewenangan dalam Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan, Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Mengingat nilai strategis yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor secara normatif di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah “Lokomotif Pembangunan Daerah” serta menjadi lini terdepan dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara partisipatif, profesional dan bertanggungjawab sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan orientasi yang diinginkan dan bersifat partisipatif terhadap perkembangan kompleksitas permasalahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah harus menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan asas rencana pembangunan daerah tersebut, maka penyusunan rencana pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor selalu menyerap informasi dari hasil evaluasi kinerja perencanaan sebelumnya.

1. Kedudukan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor bahwa Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bappeda Kota Bogor sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kota Bogor merupakan unsur penunjang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Bappeda Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

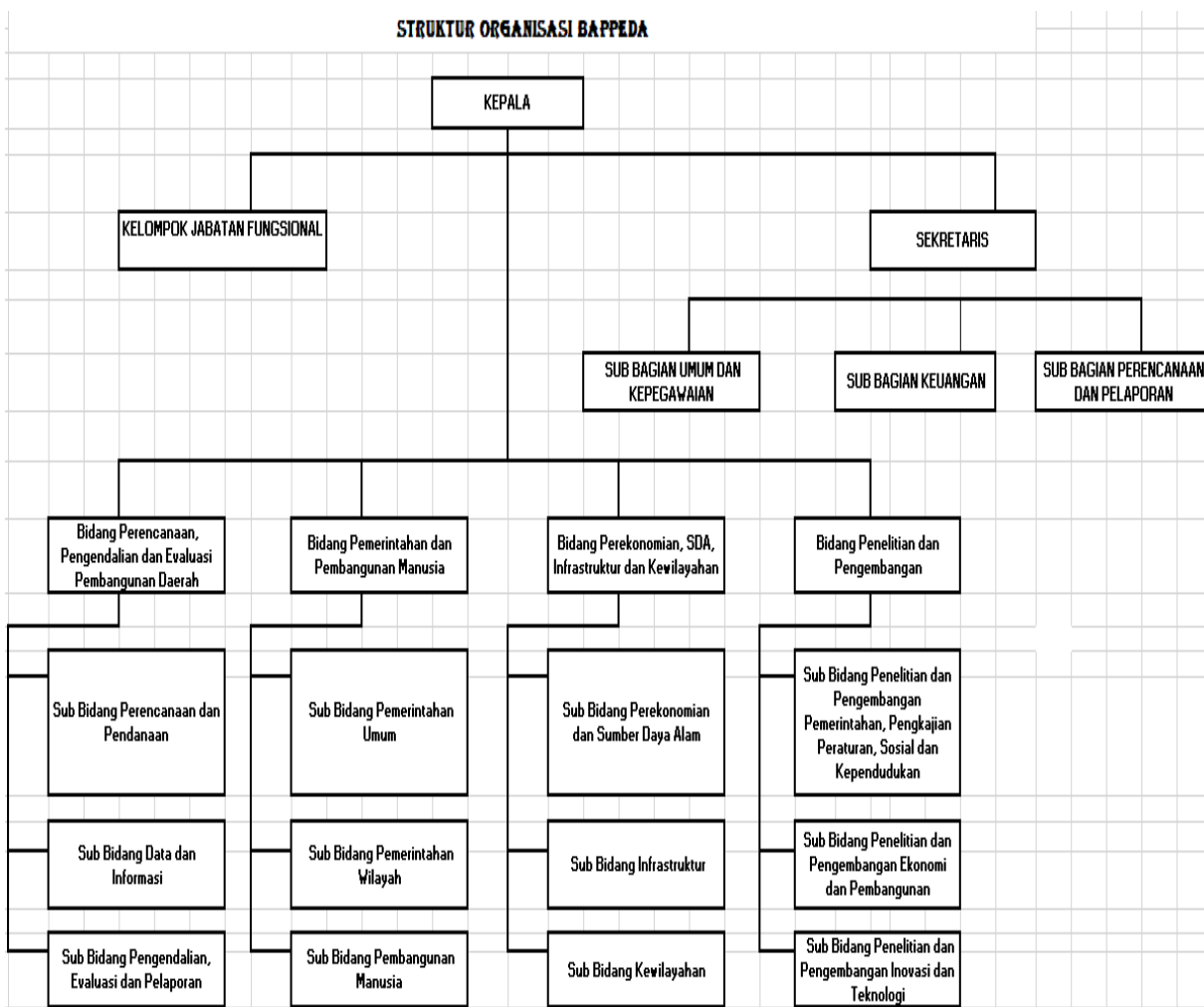
3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- 2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Wilayah;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
- 4) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Kewilayahan.
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor



Gambar I
Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sumber: Peraturan Walikota Bogor Nomor 71 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

B. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya:

- 1) Perencanaan pembangunan partisipatif, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat masih belum dapat mengakomodir sepenuhnya usulan dari masyarakat;
- 2) Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengarah pada konektivitas secara spesial serta berkelanjutan, permasalahannya:
 - a). Pembangunan daerah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor;
 - b). Pembangunan daerah masih belum berkesinambungan.
- 3) Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil (outcome).

C. Dasar Hukum

LKIP Bappeda disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang; Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

10. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

D. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut merupakan sistematika penulisan LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2021.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- a. Gambaran umum Bappeda Kota Bogor;
- b. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor;
- c. Isu Strategis;
- d. Dasar Hukum, serta;
- e. Sistematika Penulisan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Perjanjian Kinerja.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- a. Pengukuran Kinerja;
- b. Evaluasi, dan Capaian Kinerja;
- c. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan didepan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk:

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional;
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja;
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI

Untuk mendorong terwujudnya Visi Kota Bogor “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga” Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kota Bogor mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun Misi Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kota yang Sehat;
- 2) Mewujudkan Kota yang Cerdas;
- 3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Bappeda Kota Bogor berdasarkan misi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:



Gambar II
Misi dan Tujuan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang ingin dicapai, untuk itu Bappeda Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:



Gambar III
Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka dibutuhkan kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai keterpaduan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian kesempatan pendidikan aparatur;
- 2) Peningkatan koordinasi perencanaan daerah;
- 3) Peningkatan perencanaan yang partisipatif;
- 4) Peningkatan informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- 5) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.

Tujuan dan Indikator Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Persentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir Usulan/Aspirasi Masyarakat	10%
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23

Tabel 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	10.5%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	7 Rasio
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10%
3	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23
		Persentase Indikator Kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	85%
4	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP Bappeda	BB

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi Internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bogor secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Strategi yang ditetapkan adalah Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang berbasis bukti dan data secara kualitas dan kuantitas yang sinergis dan berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2019-2024. **Kebijakan** yang ditetapkan adalah Terimplementasinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang dilaksanakan Bappeda Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

Program dan Indikator Program Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.693.640.204
		Persentase Temuan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi dan BPK yang ditindaklanjuti	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterwakilan Perempuan Dalam Musrenbang (Rasio)	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	930.397.000
		Keterwakilan Anak Dalam Musrenbang (Rasio)		
		Keterwakilan Masyarakat Dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk (Rasio)		

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Total Anggaran
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD (%)		
		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota (Nilai)		
		Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR (%)		
		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan (%)	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD		677.840.200
		Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Total Anggaran
		RPJPD, RPJMD, dan RKPDP		
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Hasil Kelitbangan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.496.817.400
		Jumlah Hasil Kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
		Jumlah kampung tematik/kampung wisata		

Tabel 3 Program dan Indikator Program Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV. Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran dan Program Sekretaris serta Kepala Bidang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon IV yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian Program dan Kegiatan Kasubag/Kasubid oleh Sekretaris serta Kabid di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	10.5%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	7 Rasio
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10%
3	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23
		Persentase Indikator Kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	85%
4	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP Bappeda	BB

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Capaian (%)	Kategori	Realisasi	Keterangan
85 - 100	Sangat Baik	> Target	Tercapai dan Melebihi Target
70 - <85	Baik	= Target	Tercapai
55 - <70	Cukup	< Target	Tidak Mencapai Target
<55	Kurang	> Target	

Tabel 5 Predikat Nilai Capaian Kinerja

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran pada Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Tujuan Bappeda

Target dan Realisasi Capaian Tujuan Bappeda Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)	57,8 (Inovatif)
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Persentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir Usulan/Aspirasi Masyarakat	10%	8,88%
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang Partisipasif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23	23,75

Tabel 6 Target dan Realisasi Capaian Tujuan Bappeda Tahun 2021

2. Realisasi Perjanjian Kinerja

Target dan Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)	57,80 (Inovatif)	1.496.817.400	1.469.709.005
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	10.5%	60%		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	7 Rasio	18	413.320.000	397.580.400
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10%	8,88%		
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23	23,75	1.151.917.200	1.115.364.860
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	85%	74,91%		
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP Bappeda	BB	A	13.693.640.204	13.103.020.229

Tabel 7 Target dan Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)	57,80 (Inovatif)	100%	5162 (Inovatif)	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	10.5%	60%	571,43%	7%	53
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	7 Rasio	18 Rasio	257,14 %	11 Rasio	7
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10%	8,88%	88,80%	10%	-1,12
3	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23	23,75	103,26%	23,35	0,4
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	85%	71%	83,53%	65,57%	5,43
4	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP Bappeda	BB	A	105,64%	BB	10,42

Tabel 8 Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2021

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Kinerja RPJMD

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target kinerja RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)	57,80 (Inovatif)	100%	641-650
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang	10.5%	60%	571,43%	47,2%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun
	Kebijakan Pembangunan Daerah	ditindaklanjuti menjadi kebijakan				
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	7 Rasio	18 Rasio	257,14 %	10 Rasio
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10%	8,88%	88,80%	20%
3	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23	23,75	103,26%	26
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	85%	71%	83,53%	100%
4	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP Bappeda	BB	A	105,64%	A

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatkan Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	611-620 (Inovatif)	57,80 (Inovatif)	100%	5162 (Inovatif)	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	10.5%	60%	571,43%	7%	53

Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

Sumber: Bidang Litbang

Cara perhitungan:

1. Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi (dasar: Penetapan oleh Kemendagri)
2. Jumlah hasil litbang yang ditindak lanjut menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh Hasil Litbang x 100

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah sebagai pusat data inovasi daerah berdasarkan aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai sarana pelaporan inovasi daerah, sebagai instrument pengukuran inovasi daerah, untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai daerah, dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Walikota Bogor Tahun 2021 II-176 Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022 capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2021 dapat terealisasi dengan skor 57,80 dan mendapat Predikat Inovatif. Keberhasilan dari pencapaian target ini karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan apresiasi terhadap inovasi yang muncul dari masyarakat dalam bentuk pemberian penghargaan, dan dukungan dari Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap inovasi yang muncul serta adopsi inovasi untuk masyarakat.

Di Tahun 2021 terdapat 68 Inovasi yang diimplementasikan guna menunjang Visi Misi Kota Bogor, hal ini didapat dari Inovasi Perangkat Daerah serta Inovasi Masyarakat yang mengikuti Lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor (KRIBO). Pelaksanaan Lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor (KRIBO) diikuti oleh 86 inovator dan sebanyak 76 inovator lolos dalam seleksi administrasi. Dari 76 inovator, terdapat 54 inovasi yang sudah diimplementasikan di masyarakat. Secara umum untuk setiap misi yang diimplementasikan dapat menunjang satu atau lebih dari satu misi dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

Inovasi tersebut dapat diimplementasikan untuk menunjang Visi Kota Bogor, yaitu “Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” Total terdapat sebanyak 68 inovasi, dengan rincian sebagai berikut 43 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke-1 “Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat”, sebanyak 60 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke-2 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas, sedangkan untuk menunjang Misi ke-3 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera” terdapat sebanyak 42 inovasi.

Daftar Inovasi Tahun 2021

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
1.	SOLID	Teknologi, Sosial	Dinas Sosial	Misi 2, Misi 3
2.	Prokes di Resto Bumi Aki	Kesehatan	Restoran Bumi Aki	Misi 1, Misi 2, Misi 3

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
3.	SIMAE	Pelayanan, Transportasi, Teknologi	Dinas Perhubungan	Misi 2
4.	e-SPPT	Pelayanan, Teknologi	Bapenda	Misi 2
5.	Si Kancil Berlari	Pelayanan, Teknologi	Disdukcapil	Misi 2
6.	e-Retribusi	Teknologi, Keuangan	Bapenda	Misi 2
7.	Nga-EMAS	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Misi 1, Misi 2
8.	VO BPHTB	Pajak, Teknologi	Bapenda	Misi 2, Misi 3
9.	SIPASPROP	Pajak, Teknologi	Bapenda	Misi 2, Misi 3
10.	API BPN, KPK, Tax Clearance	Pajak, Teknologi	Bapenda	Misi 2, Misi 3
11.	Kujang Fresh Perumda Pakuan Jaya	Teknologi, Pelayanan	Perumda Pakuan Jaya	Misi 1, Misi 2, Misi 3
12.	MIS-LLTT	Teknologi, Pelayanan	Dinas PUPR	Misi 1, Misi 2
13.	Integrasi DGIS	Teknologi, Tata Ruang	Dinas PUPR	Misi 2
14.	SIMASDA	Teknologi, Pelayanan	BKAD	Misi 2
15.	Sepeda Air Bambu	Transpostasi	Zainullah	Misi 2, Misi 3
16.	Kalpataru Nusantara Emas 2045	Sosial	Pamitran Samida Ploso	Misi 1, Misi 3
17.	Parfum Anak Azkiya	Kerajinan dan Industri Rumah Tangga	Ayep Suhaeri	Misi 1, Misi 3
18.	Kerajinan/Lukisan Memanfaatkan Limbah Kulit/Cangkang Telur	Ekonomi dan Budaya	Bambang Sritanyo	Misi 1, Misi 2, Misi 3
19.	Bravely Moms	Kesehatan	Latifa Tauhid	Misi 1, Misi 2

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
20.	Bersama Ojek ID Pasti Bisa	Sosial	Tresna Nugraha	Misi 1, Misi 2, Misi 3
21.	Lukisan Hoya	Kerajinan dan Industri Rumah Tangga	Dwi Ratnawati	Misi 2, Misi 3
22.	Sistem Digitasi Integrasi TPPS 3R Kota Bogor	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Taufan Pramono	Misi 1, Misi 2,
23.	Cincau Rasa Organik	Pangan dan Agribisnis	Elis Mulyani	Misi 2, Misi 3
24.	Cocovine	Pangan dan Agribisnis	Wiwik Puntorini	Misi 1, Misi 2, Misi 3
25.	Mesin Blender	Air Minum, Kesehatan dan Lingkungan Hidup	KSM ASRI	Misi 1, Misi 2
26.	Krestik	Kerajinan dan Industri Rumah Tangga	Bank Sampah Unit Sejahtera	Misi 1, Misi 2, Misi 3
27.	TPS 3R Citra Mandiri Kertamaya	Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Mamat	Misi 1, Misi 2, Misi 3
28.	Kumbang Go	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunitas UMKM Mulyaharja Bangkit	Misi 1, Misi 2, Misi 3
29.	Herb Inhaler Theraphy	Kesehatan	PT. Matra Kreasi Mandiri	Misi 1, Misi 2
30.	Salt Detector	Kesehatan	PT. Matra Kreasi Mandiri	Misi 1, Misi 2
31.	Integrasi Kampung KB Babakan Cimahpar	Ekonomi	Org. Kampung KB Harapan Babakan RW 09	Misi 1, Misi 2, Misi 3
32.	Pemanfaatan Limbah Sisa Produksi Menjadi	Pangan dan Agribisnis	Novvy Natalia	Misi 1, Misi 2, Misi 3

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
	Camilan Enak dan Sehat			
33.	Pengolahan Limbah Tandan Sawit (TKKS) Menjadi Shell Helm Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Kelompok Tani dan UMKM di Masa Pandemi	Transportasi	Siti Nikmatin	Misi 1, Misi 2, Misi 3
34.	Nutribank dari limbah hidrogel diapers dan ecoplank dari limbah fiber diapers	Lingkungan	Jaelani Saputra	Misi 1, Misi 2
35.	Incenerator pembakaran sampah residu	Teknologi	Jaelani Saputra	Misi 1, Misi 2
36.	Menyulap Sampah Jadi Emas	Lingkungan	Bank Sampah Unit Beriman	Misi 1, Misi 2, Misi 3
37.	Kizi Kemiri Produk Perawatan Rambut Alami dari Alam	Ekonomi	Irna Nurhasanah	Misi 1, Misi 2, Misi 3
38.	Langit Digital Mulia	Pendidikan	Irna Nurhasanah	Misi 1, Misi 2
39.	Pokoke (Pupuk Organik Kotoran Kelinci)	Lingkungan	KTT Mulya Jempol Bangkit	Misi 1, Misi 2, Misi 3
40.	Si Unchal	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Fandi Septiana	Misi 1, Misi 2

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
41.	Electric Portable Kick Wastafel	Kesehatan	Anton Mawardi	Misi 1, Misi 2
42.	Batik Motif Ke-Ulamaan	Ekonomi	Dr. Hj. Indriya Rusmana, S.E., M.Pd.I.	Misi 1, Misi 2, Misi 3
43.	Birdnest Mask by PraMitss "inovasi masker organik dari sarang burung walet"	Ekonomi	Pramita Nurilisan	Misi 1, Misi 2, Misi 3
44.	Rovestik, keripik stik daun mangrove	Ekonomi	Pramita Nurilisan	Misi 3
45.	Olize (Ozone-based Sterilizer)	Teknologi, Kesehatan	Politeknik AKA (Singgih)	Misi 1, Misi 2
46.	KASI Care: Aplikasi berbasis website yang membantu memudahkan koordinasi dalam sistem pengelolaan limbah/sampah pasien Covid-19 Isolasi Mandiri	Teknologi, Kesehatan	UIKA (Andi)	Misi 2, Misi 2
47.	Garcia Choco chips Cookies	Pangan dan Agribisnis	UNB (Linar Humaira, Ir., M.S)	Misi 2, Misi 3
48.	Klambirbirdnest	Teknologi	Pramita Nurilisan	Misi 1, Misi 2
49.	We Grobid	Pangan dan Agribisnis	Nico Saputra	Misi 1, Misi 2
50.	Only Drink : Minuman Fungsional dari	Pangan dan Agribisnis	Fahri Sinulingga	Misi 1, Misi 2, Misi 3

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
	Oncom, Rumput Laut, dan Sari Buah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan serta Menambah Nilai Ekonomi Bahan Baku dari Kota Bogor			
51.	TaniKu	Pangan dan Agribisnis	Imam Nur Akbar	Misi 2, Misi 3
52.	SALEG	Teknologi	Muhamad Adam Maulana	Misi 2, Misi 3
53.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Industri Kreatif Berbahan Lidi Sawit Untuk Meningkatkan Ekonomi di Masa Pandemi	Sosial	Dyantha Adawiyah Widodo	Misi 2, Misi 3
54.	Inovasi Ekstrak Biji Mahoni	Kesehatan	Dyantha Adawiyah Widodo	Misi 1, Misi 2
55.	"BEE" (Bogor e-Mental Health Edu&Care)	Kesehatan, Sosial	Amrina Husna Salimah	Misi 1, Misi 2
56.	Madu Sumbawa Premium	Pangan dan Agribisnis	Amar Muammar Qadafi	Misi 1, Misi 3
57.	Inovasi Fullface Mask dari Kayu Balsa (F Mask)	Kesehatan	Naufal Setyo Hema Wiratama	Misi 1, Misi 2
58.	Face & Body Mask & Scrub	Kesehatan	Mutiara Tauhid	Misi 1, Misi 2, Misi 3

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
59.	Batik Talas: Inovasi Oleh-oleh Kue Lapis Talas Guna Memopulerkan Motif Batik Khas Bogor	Pangan dan Agribisnis	Yuda Arduansyah	Misi 2, Misi 3
60.	PICO (Aplikasi Pembatasan Kapasitas untuk Mencegah Penyebaran COVID-19)	Teknologi	Muhammad Farhan	Misi 1, Misi 2
61.	Pemanfaatan Teknologi Biologi Untuk Mengolah Sampah Organik Menjadi Pakan Ternak dan Pupuk Tanaman	Lingkungan	Chaerul Tingkar, S.Pd	Misi 1, Misi 2, Misi 3
62.	Valve Pintar (Smart-Valve)	Teknologi, Pangan	I Gusti Made Krisna Bakti	Misi 2, Misi 3
63.	Eucalyptus Magic Booster	Kesehatan dan Obat-obatan	Kalea Dehan Majeeda	Misi 1, Misi 2
64.	Diversifikasi pangan dari fermentasi ubi jalar (Ipomea batatas) dan talas (Colocasia esculenta) menjadi kue bolu panggang Taplas, Tapubi, dan Tabiplas	Pangan dan Agribisnis	Amelia Kartika	Misi 2, Misi 3

NO.	INOVASI	ASPEK	INOVATOR	IMPLEMENTASI
65.	Pengolahan Santan Kelapa Menjadi Minyak Kelapa Murni (VCO) dengan Bantuan Enzim Papain	Pangan dan Agribisnis	Muhammad Qashmalsyah Habibillah	Misi 1, Misi 2, Misi 3
66.	Minyak dari fermentasi santan dan ampas kelapa	Kerajinan dan Industri Rumah Tangga, Lingkungan	Wildan Abizard	Misi 1, Misi 2, Misi 3
67.	K05 Growth Serum	Lingkungan	Alexander Farrel Ardan	Misi 2, Misi 3
68.	Essential Oil - Plurosia	Kesehatan, Lingkungan	Naila Rafa Kirani	Misi 1, Misi 2, Misi 3

Tabel 10 Daftar Inovasi Tahun 2021

Sumber: Bidang Litbang

Pada Tahun 2021, terdapat 5 kajian yang telah dihasilkan oleh Bappeda Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kajian Pendidikan;
2. Kajian Kampung Tematik;
3. Kajian Sentra Kuliner;
4. Kajian Kebersihan dan Lingkungan;
5. Kajian Aplikasi Digital Koordinasi Program Penanggulangan Stunting.

Adapun hasil kajian yang dijadikan kebijakan sebanyak 3 (tiga) kajian dari 5 (lima) kajian yang dihasilkan, sehingga realisasi persentase rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebesar 60%, hasil kajian tersebut sebagai berikut:

1. Kajian Pendidikan;
2. Kajian Kampung Tematik;
3. Kajian Sentra Kuliner.

Sasaran 2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	7 Rasio	18 Rasio	257,14%	11	7
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10%	8,88%	88,8%	10%	-1,12

Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Sumber: Bidang PPEPD

Cara perhitungan:

1. Jumlah masyarakat yang hadir dalam Musrenbang dibagi jumlah penduduk Kota Bogor x 10.000
2. Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD di bagi total jumlah APBD x 100

Dalam Proses Perencanaan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Peran masyarakat bukan sebagai objek saja tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Semangat partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam mengikuti kegiatan musrenbang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota masih tinggi, jumlah peserta Musrenbang dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota sebanyak 2005 peserta, jika di hitung keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk maka hasilnya menjadi 18 Rasio, hasil ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu sebesar 7 Rasio. Bila dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 sebesar 11 Rasio terjadi peningkatan sebesar 7 Rasio, artinya kepercayaan, harapan, antusiasme masyarakat Kota Bogor terhadap proses pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor masih tinggi.

Proporsi Penggunaan Anggaran serta Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan untuk dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Dalam kaitan dengan APBD di Kota Bogor yang orientasi penggunaannya adalah untuk kemanfaatan warga

Kota Bogor maka Bappeda menargetkan persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD menjadi salah satu Indikatornya, yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda, dimana dilakukan evaluasi secara berkala antara hubungan belanja daerah terhadap realisasi capaian kinerja pembangunan daerah. Capaian usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD pada Tahun 2021 mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 10% sedangkan di Tahun 2021 sebesar 8,88%, menurun sebesar 1,12%, penurunan ini disebabkan karena sebagian besar anggaran masih difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid 19, Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga Kota Bogor dan Pemulihan Ekonomi Kota Bogor.

Sasaran 3: Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23	23,75	103,26%	23,35	0,4
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	85%	74,91%	88,12%	65,57	9,34

Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Sumber: Bidang PPEPD

Cara perhitungan:

1. Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB
2. Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran x 100

Tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik semakin meningkat, hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan melakukan perbaikan dalam pengambilan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, dalam rangka mendukung hal tersebut perlu adanya reformasi perencanaan dan penganggaran.

Pendekatan utama dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini adalah perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran harus memperlihatkan kinerja pada periode sebelumnya dan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, oleh karena itu sinergitas dan keberlanjutan perencanaan

pembangunan serta evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk di perhatikan dalam rangka pencapaian kinerja perencanaan dan pembangunan sesuai dengan target yang telah di tentukan dalam RPJMD.

Sesuai dengan hasil penilaian SAKIP Tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Pemerintah Kota Bogor memperoleh nilai sebesar 75,15 atau predikat BB, sedangkan untuk komponen perencanaan kinerja Kota Bogor memperoleh nilai sebesar 23,75. Di Tahun 2020 untuk komponen perencanaan kinerja mendapatkan nilai sebesar 23,35, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,4 point, artinya proses perbaikan terus dilakukan oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil evaluasi dari Kemenpan RB dimana dokumen perencanaan yang disusun di periode selanjutnya telah memperhatikan perumusan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja outcome sesuai dengan yang diharapkan, penjabaran kinerja disetiap levelnya, memenuhi kriteria specific, measurable, achieveable, relevant dan time bound (smart) serta memperhatikan keselarasan antara kegiatan, program dan sasaran strategis sehingga anggaran yang digunakan efektif untuk pencapaian kinerja dalam Renstra PD ataupun RPJMD.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan, efisiensi, efektifitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan pelaksanaan Program/Kegiatan berdasarkan Indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra PD dan RPJMD, selain itu evaluasi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana, pelaksanaan rencana maupun setelah kebijakan kebijakan/program/kegiatan selesai dilaksanakan.

Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2021 tidak mencapai target yang telah di tetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 74,91% dimana target yang ditetapkan sebesar 85%, hal ini dikarenakan hingga laporan ini disusun, capaian yang digunakan masih merupakan capaian sementara (terdapat data yang belum disampaikan oleh Perangkat Daerah). Bila dibandingkan dengan capaian kinerja di Tahun 2020 sebesar 65,57% terjadi peningkatan capaian sebesar 9,34%. Yang berarti bahwa telah dilakukan proses perbaikan di sisi monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga dalam prosesnya bisa mengakomodir penyelesaian terhadap hambatan tercapainya Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran 4: Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja	Capaian Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP Bappeda	BB (76)	A (84,51)	119,19%	BB (74,09)	10,42

Tabel 13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah

Cara perhitungan:

1. Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah

Tatakelola Pemerintahan yang baik adalah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/good governance tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik meliputi transparansi, responsif, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas.

Di Tahun 2020 hasil evaluasi SAKIP Bappeda oleh Inspektorat Daerah memperoleh nilai sebesar 74,09 atau predikat BB sedangkan hasil evaluasi SAKIP di Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 84,51 atau predikat A, terdapat peningkatan point sebesar 10,42 point, hal ini menunjukkan adanya proses perbaikan yang mengacu pada hasil evaluasi oleh Itda baik dari sisi pemenuhan dokumen mulai dari dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, rancangan RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 sampai dengan dokumen Jankin, Rencana Aksi Kinerja, LKIP, DPA dan dokumen teknis lainnya serta sisi perbaikan komponen penilaian SAKIP, khususnya komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian sasaran kinerja organisasi, dengan akumulasi seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi sebagai berikut:

Tabel Rincian Penilaian LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	28,52
2	Pengukuran Kinerja	25	22,81
3	Pelaporan Kinerja	15	11,99
4	Evaluasi Internal	10	3,00
5	Capaian Kinerja	20	18,19
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Tabel 14 Rincian Penilaian LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2021

Merujuk pada hasil evaluasi SAKIP di periode sebelumnya, Bappeda berkomitmen untuk memperbaiki komponen penilaian evaluasi, dimana dalam rekomendasinya, Bappeda diminta dalam melakukan evaluasi untuk membuat kesimpulan mengenai keberhasilan dan atau kegagalan program, melakukan analisis capaian program, analisis hal hal yang menjadi hambatan, memberikan rekomendasi dan alternatif perbaikan serta menindaklanjuti hasil evaluasi program. Tidak hanya sebatas melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta penyerapan anggaran saja.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2021, Tanggal 8 November Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 188 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Bappeda Kota Bogor mengelola anggaran sebesar **Rp. 16.798.694.804.- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah)** dengan realisasi sebesar Rp. **16.085.674.494.- (Enam Belas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)** atau sebesar **95,76%**. Rincian Anggaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2021 per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

**Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2021**

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.803.044.890	10.460.092.658	96,83
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.803.044.890	10.460.092.658	96,83
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.650.000	119.108.900	99,55
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.914.500	99,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.968.000	99,68
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.650.000	89.226.400	99,53
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.830.250	684.955.805	91,84
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.347.700	9.345.900	99,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.364.400	86.002.785	98,44
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.537.350	5.529.300	99,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.252.000	11.847.500	53,24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.507.800	37.990.000	76,74
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	10.200.000	85,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	19.590.000	5.865.000	29,94

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.231.000	518.175.320	95,91
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.716.000	83.746.000	93,35
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	89.716.000	83.746.000	93,35
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	494.204.700	491.251.398	99,40
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.204.700	491.251.398	99,40
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960.091.064	863.654.419	89,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.999.536	115.667.175	68,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.091.528	747.987.244	94,43
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.103.300	400.211.049	83,19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.991.300	183.677.011	75,28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.150.000	111.870.000	84,65
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.962.000	104.664.083	99,72
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	751.729.000	711.314.060	94,62
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.000.000	49.764.660	99,53
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	32.200.000	8.592.000	26,68
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	413.320.000	397.580.400	96,19
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.209.000	255.377.000	99,68
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.668.000	129.935.000	95,77

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	135.668.000	129.935.000	95,77
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	43.000.000	39.900.000	92,79
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.000.000	39.900.000	92,79
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	45.890.000	45.490.000	99.13
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.150.000	3.150.000	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.000.000	16.000.000	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.740.000	26.340.000	98,50
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	631.950.200	586.306.200	92,78
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	573.054.000	532.220.000	92,87
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.410.400	6.410.400	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	52.485.800	47.675.800	90,84
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	233.842.000	230.223.000	98,45
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	101.290.000	101.095.000	99,81

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	132.552.000	129.128.000	97,42
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.012.415.400	998.144.005	98,59
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	600.135.400	587.599.005	97,91
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	412.280.000	410.545.000	99,58
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	250.560.000	241.342.000	96,32
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	225.560.000	217.492.000	96,42
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	25.000.000	23.850.000	95,40
	JUMLAH	16.798.694.804	16.085.674.494	95,76

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Sumber: Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2021

Berdasarkan Tabel Anggaran dan Realisasi APBD Bappeda Kota Bogor sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 bahwa capaian seluruhnya adalah **95,76%** termasuk ke dalam kategori **BAIK**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2021. LKIP menggambarkan Kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Di Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang mencapai/melebihi target dan 2 (dua) indikator sasaran yang tidak mencapai target, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 16.798.694.804.- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 16.085.674.494.- (Enam Belas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 95,76%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan PD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra PD dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan kritikal point yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan Bappeda yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Organisasi di tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan yaitu:

SASARAN:

1. Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Capaian Kinerja, Sinergitas dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Meningkatnya Tatakelola Bappeda yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

INDIKATOR:

1. Indeks Inovasi Daerah;
2. Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan;
3. Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000;
4. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD;
5. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota;
6. Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target;
7. Nilai AKIP BAPPEDA.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Bappeda, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia. Setelah itu baru ditetapkan sasaran yang ingin dicapai, yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai, program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing target kinerja sasaran. LKIP digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Organisasi.